



Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan

MELAYU
MELayan Elemen Sinergi Akuntabel Teknologi

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Pusat Fasilitas Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN
KELEMBAGAAN INTERNASIONAL**

JL.MEDAN MERDEKA BARAT
NO. 8 JAKARTA 10110

Email : pfkki@dephub.go.id

Web-site : <http://www.dephub.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN
INTERNASIONAL**

NOMOR : SK 49 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

**PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN
INTERNASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional tentang Rencana Strategis Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025 - 2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1049);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL TAHUN 2025 - 2029
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional ini.
- KEDUA : Renstra Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah dokumen perencanaan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KETIGA : Ruang lingkup Renstra Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, meliputi :
- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;
 - c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka, Regulasi Kerangka Kelembagaan, dan Manajemen Risiko;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
 - e. Penutup.

- KEEMPAT : Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Keputusan Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 30 Desember 2025

Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan
dan Kelembagaan Internasional,



SALINAN Keputusan Kepala FKKI ini disampaikan kepada :
Kepala Biro Perencanaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik.

Berpedoman pada **Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029** dan sejalan dengan **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029** dan **keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029**, bahwa Rencana Strategis Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan berbagai potensi, tantangan, hambatan, dan peluang yang ada serta mungkin timbul di masa mendatang. Dokumen ini juga menjadi pedoman dan arah kebijakan bagi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta sebagai dasar bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja selama periode 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi pegangan yang berguna bagi semua.

Hormat kami,



Kepala Pusat FKKI
Amiruddin

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1.1 Kondisi Umum	1
	1.1.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	3
	1.1.2 Evaluasi dan Pelaksanaan Renstra PFKKI 2020-2024	9
	1.2 Potensi dan Permasalahan	13
	1.2.1 Potensi PFKKI	13
	1.2.2 Tantangan dan Permasalahan PFKKI	21
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	2.1 Visi PFKKI	22
	2.2 Misi PFKKI	23
	2.3 Tujuan PFKKI	24
	2.4 Sasaran PFKKI	25
	2.5 Strategic Map PFKKI 2025-2029	26
	2.6 Cascading PFKKI 2025-2029	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	3.1 Arah Kebijakan Nasional	28
	3.1 Visi Misi Presiden	30
	3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan	31
	3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PFKKI	32
	3.4 Kerangka Regulasi	34
	3.5 Kerangka Kelembagaan	36
	3.6 Manajemen Risiko	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	4.1 Target Kinerja	38
	4.2 Kerangka Kinerja dan Manual IKU	40
	4.3 Kerangka Pendanaan	42
BAB V PENUTUP	5.1 Kaidah Pelaksanaan	43

A faint, light blue world map is visible in the background, centered behind the title text.

BAB I

PENDAHULUAN





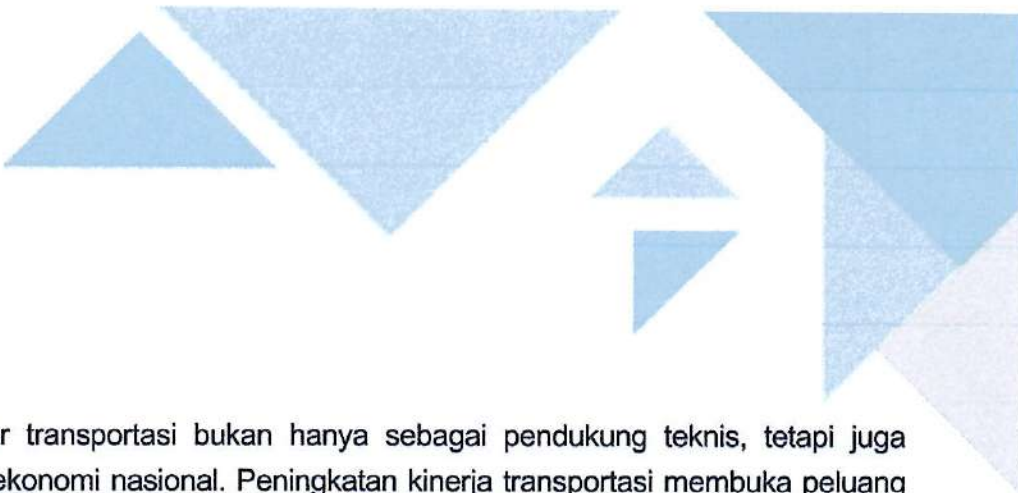
1.1 KONDISI UMUM

Pembangunan sektor transportasi nasional pada periode 2025–2029 berlangsung dalam konteks lingkungan strategis yang semakin dinamis dan penuh tantangan, baik di tingkat nasional maupun global. Proses pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 masih memerlukan dukungan konektivitas transportasi yang andal dan efisien, seiring dengan perubahan pola mobilitas dan adaptasi kebiasaan baru masyarakat. Di saat yang sama, percepatan perkembangan teknologi pada era Industri 4.0 dan Society 5.0 mendorong kebutuhan transformasi sistem transportasi yang semakin digital, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan yang aman, cepat, dan berkelanjutan.

Kondisi umum pembangunan transportasi juga dipengaruhi oleh munculnya *triple planetary crisis* yang meliputi perubahan iklim, degradasi lingkungan dan polusi, serta meningkatnya tekanan terhadap ketersediaan sumber daya. Tantangan tersebut menuntut pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi yang rendah emisi, ramah lingkungan, serta memiliki ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal dan meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan mendorong perlunya optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, termasuk pemanfaatan skema pembiayaan inovatif dan kerja sama internasional.

Selain faktor lingkungan dan teknologi, dinamika ekonomi global dan perkembangan geopolitik internasional turut mempengaruhi arah pembangunan transportasi nasional. Ketatnya persaingan sumber daya, disrupsi rantai pasok global, serta perubahan kebijakan dan standar internasional menuntut adanya peningkatan daya saing, efisiensi, dan tata kelola sektor transportasi. Dalam kondisi tersebut, kerja sama internasional menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung penguatan kapasitas nasional, akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta peningkatan peran Indonesia dalam berbagai forum dan inisiatif global di bidang transportasi.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, pembangunan transportasi nasional pada periode 2025–2029 diarahkan untuk mampu merespons tantangan global sekaligus menjawab kebutuhan domestik, melalui penguatan konektivitas, transformasi digital, pengarusutamaan prinsip keberlanjutan, serta peningkatan ketahanan dan daya saing sistem transportasi nasional secara menyeluruh.



Secara keseluruhan, sektor transportasi bukan hanya sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Peningkatan kinerja transportasi membuka peluang investasi, mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan fondasi kebijakan yang kuat melalui Renstra 2025-2029, sektor ini diharapkan mampu menjadi katalis transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju yang berkelanjutan, inklusif, dan terhubung secara efisien.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, hasil evaluasi kinerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan tingkat realisasi indikator kegiatan rata-rata mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas PFKKI dalam mendukung fasilitasi kerja sama dan kemitraan internasional sektor transportasi. Namun demikian, capaian kinerja tersebut bersifat pada level kegiatan, sehingga kontribusinya lebih berperan sebagai enabler kelembagaan dan belum secara langsung menyelesaikan permasalahan pembangunan transportasi secara substansial. PFKKI berfungsi sebagai unit pendukung strategis yang memperkuat sasaran Sekretariat Jenderal, yaitu peningkatan kapabilitas kerja sama dan kemitraan Kementerian Perhubungan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan yaitu terwujudnya *good governance and clean government*.

1.1.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL Permenhub No. 4 Tahun 2025



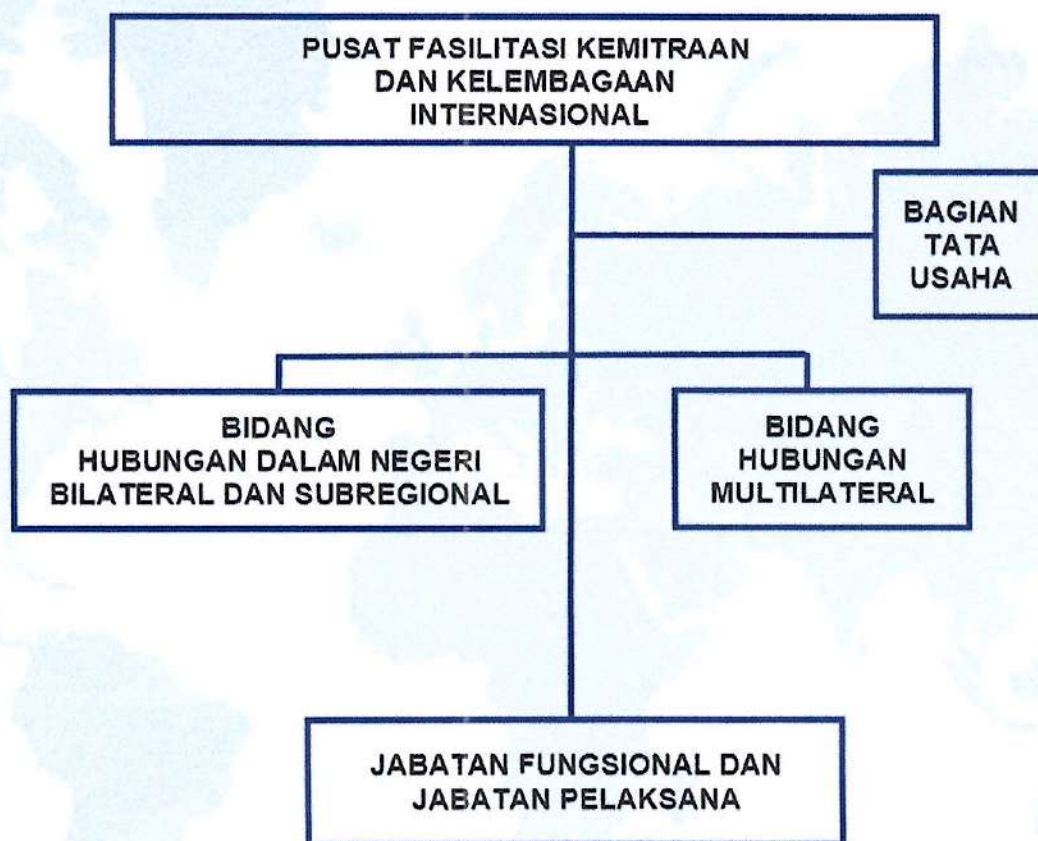
TUGAS

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, pelaksanaan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi

FUNGSI

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
2. Penyiapan pelaksanaan di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
3. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
4. Penyiapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
5. Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagan Struktur Organisasi
Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional



Struktur organisasi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional;
- c. Bidang Hubungan Multilateral; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN TATA USAHA



TUGAS

Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan.

FUNGSI

01

Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta evaluasi dan pelaporan Pusat dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri; dan

02

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, dukungan reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama.

TUGAS DAN FUNGSI BIDANG HUBUNGAN DALAM NEGERI, BILATERAL DAN SUBREGIONAL



TUGAS

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional dalam hubungan bilateral dan subregional di bidang transportasi.

FUNGSI

01

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Amerika dan Eropa dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;

02

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.

TUGAS DAN FUNGSI **BIDANG HUBUNGAN MULTILATERAL**

TUGAS



Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional dalam hubungan multilateral di bidang transportasi.

FUNGSI

01

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa;

02

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Non Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Perhubungan sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan dan Tenaga Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dibawah koordinasi Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Atase Perhubungan atau Staf Teknis Perhubungan mempunyai tugas pokok mewakili kepentingan Departemen Perhubungan dalam pelaksanaan hubungan kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bidang transportasi dengan Negara Penerima/Negara Akreditasi dan/atau organisasi internasional. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, PNS yang ditugaskan sebagai Atase Perhubungan atau Staf Teknis Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran tahunan (RKA-KL);
2. Perwakilan Kementerian Perhubungan dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang transportasi di Negara Penerima/Negara Akreditasi, dan/atau organisasi internasional;
3. Peningkatan dan koordinasi hubungan serta kerjasama dengan Negara Penerima/Negara Akreditasi dan/atau organisasi internasional, atau berbagai instansi/lembaga terkait di bidang transportasi;
4. Pelaporan pelaksanaan tugas serta analisis dan rekomendasi yang berkaitan dengan bidang transportasi di Negara Penerima/Negara Akreditasi, dan/atau organisasi internasional;
5. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan asset secara berkala kepada Kementerian Perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain secara proaktif sesuai dengan arahan Pimpinan Kementerian Perhubungan dan atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri (Atase Perhubungan) berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di 8 (delapan) perwakilan sebagai berikut:

1. Kuala Lumpur (Malaysia)
2. Singapura (Singapura)
3. Tokyo (Jepang)
4. Jeddah (Arab Saudi)
5. Montreal (Kanada)
6. London (Inggris)
7. Washington DC (Amerika Serikat)
8. Den Haag (Belanda)

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang sampai dengan akhir Tahun 2025 sebanyak 39 orang, yang dikelompokkan sesuai pangkat golongan dan tingkat pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Menurut Golongan

JUMLAH	GOLONGAN						
	PNS				PPPK		PPPK NON GOLONGAN
	IV	III	II	I	IX	V	
39	7	21	3	-	5	3	1

Menurut Pendidikan (PNS)

S3	S2	Spesialis	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
-	12	-	15	-	1	2	1	-	-

Menurut Pendidikan (PPPK)

S3	S2	Spesialis	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
-	-	-	5	-	-	-	3	-	-

Menurut Pendidikan (NON-PNS)

S3	S2	Spesialis	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

1.1.2 EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENSTRA PFKKI 2020-2024

Evaluasi Kinerja PFKKI TA. 2020 - 2024

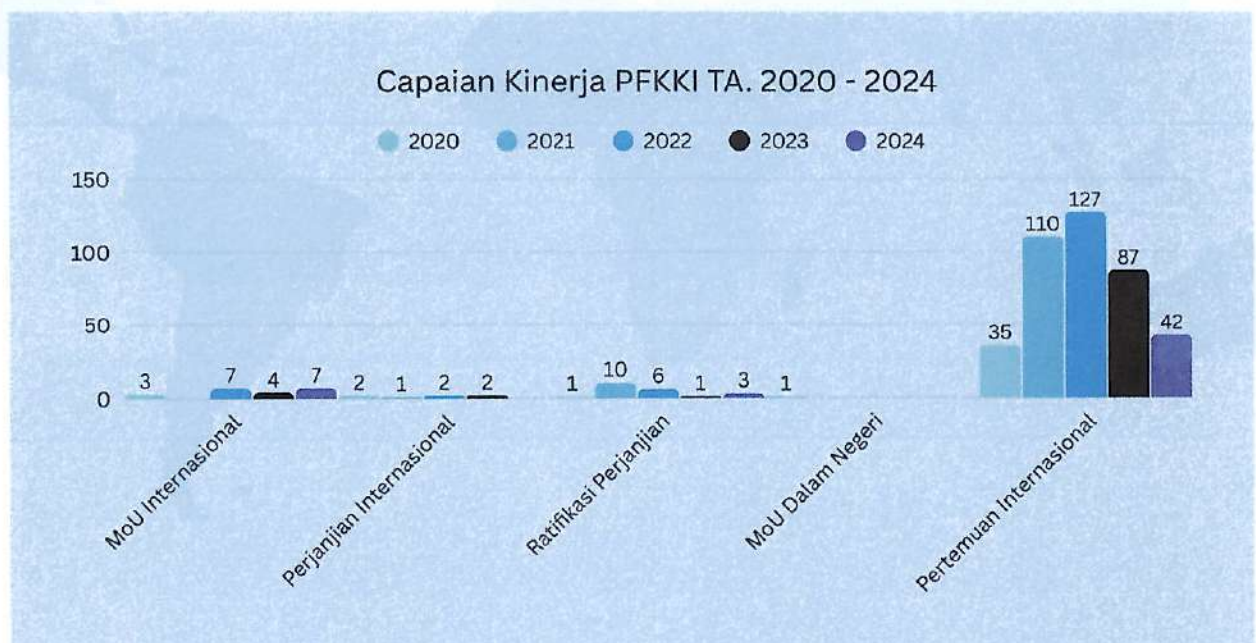
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Baseline 2020	Target 2024	Capaian 2020 - 2024
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik/ Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	80	87	● Tercapai (108.75%)
	Terselenggaranya Layanan Ketatausahaan	100%	100%	● Tercapai (100%)
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Bidang Transportasi	100%	100%	● Tercapai (100%)
	Terselenggaranya Kegiatan Sidang Internasional/ Kerjasama Luar Negeri Bidang Transportasi	100%	100%	● Tercapai (100%)
	Terlaksananya Bantuan Delegasi RI ke Sidang Internasional dan Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	100%	100%	● Tercapai (100%)
	Tersusunnya Naskah Perjanjian Internasional Bidang Transportasi	100%	100%	● Tercapai (100%)
	Terselenggaranya Sosialisasi/ Diseminasi/ Seminar/ Workshop/ Rapat Koordinasi pada Lingkup Kerjasama Transportasi	100%	100%	● Tercapai (100%)
	Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat FKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	100%	100%	● Tercapai (100%)

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Capaian Kinerja PFKKI TA. 2020 - 2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Perjanjian Internasional							
a.	Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding	Dokumen	3	-	7	4	7	100%
b.	Perjanjian/Agreement	Dokumen	2	1	2	1	-	6
c.	Ratifikasi Perjanjian/Ratification Agreement	Dokumen	1	10	6	1	3	21
2	Perjanjian Dalam Negeri/Domestic Agreement							
a.	Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding	Dokumen	1	-	-	-	-	1
3	Pertemuan Internasional/International Meeting	Pertemuan	35	110	127	87	42	401

Sumber: Data Statistik Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional



Sumber: Data Statistik Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Realisasi Anggaran PFKKI TA. 2020 - 2024

Tahun	Pagu Awal	Pagu Revisi	Pagu Efektif	Realisasi	Capaian
2020	20.494.200.100	14.599.593.000	14.599.593.000	14.474.114.838	99,14
2021	24.356.606.000	13.974.341.000	13.974.341.000	13.937.281.758	99,73
2022	14.242.765.000	13.241.070.000	13.241.070.000	13.193.248.931	99,64
2023	13.399.157.000	13.221.157.000	13.221.157.000	13.220.277.743	99,99
2024	15.782.395.000	15.041.936.000	15.041.936.000	14.365.450.335	95,50
Persentase Rata-Rata Realisasi 2020-2024					98,80

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

- Selama periode Tahun Anggaran 2020–2024, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik.
- Meskipun terjadi penyesuaian pagu anggaran setiap tahun, realisasi anggaran secara konsisten berada pada tingkat tinggi, yaitu di atas 99% pada 2020–2023 dan sebesar 95,50% pada 2024.
- Secara kumulatif, rata-rata persentase realisasi anggaran mencapai 98,80%, mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam mendukung pelaksanaan fasilitas kemitraan dan kerja sama internasional bidang transportasi.
- Kinerja ini menjadi landasan yang kuat bagi penguatan peran PFKKI dan penyusunan kebijakan serta program strategis pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025–2029.

Realisasi Anggaran Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri TA. 2020 - 2024

Satker	PAGU Alokasi 2020	Realisasi 2020	%	PAGU Alokasi 2021	Realisasi 2021	%	PAGU Alokasi 2022	Realisasi 2022	%	PAGU Alokasi 2023	Realisasi 2023	%	PAGU Alokasi 2024	Realisasi 2024	%
Den Haag	2.022.257.000	1.881.742.923	93,05	2.100.768.000	2.087.504.111	99,37	2.020.689.000	2.013.617.219	98,61	2.047.499.000	2.016.732.927	98,50	3.429.525.000	3.381.680.965	98,60
Tokyo	1.876.591.000	1.798.359.776	95,83	2.473.257.000	2.461.789.696	99,54	1.636.104.000	1.606.608.417	98,20	2.197.499.000	2.117.520.047	96,36	4.157.931.000	4.120.306.506	99,10
Washington DC	2.004.065.000	1.840.522.668	91,84	1.799.440.000	1.752.047.149	97,37	1.915.256.000	1.890.011.767	98,68	2.047.500.000	2.033.094.285	99,30	3.219.800.000	3.139.939.525	96,42
Kuala Lumpur	2.045.762.000	1.854.250.852	90,64	1.785.675.000	1.768.596.897	99,04	2.259.112.000	2.251.823.473	99,68	2.047.499.000	2.030.654.317	99,18	3.605.416.000	3.566.814.129	93,20
Singapura	2.099.913.000	1.785.985.730	85,05	1.636.124.000	1.630.201.893	99,64	1.947.139.000	1.946.869.412	99,82	3.417.506.000	3.379.298.523	98,88	3.663.848.000	3.648.634.039	99,58
Montreal	2.501.061.000	2.399.630.220	95,94	2.009.954.000	1.979.662.899	98,49	2.995.085.000	2.988.194.614	99,72	2.047.499.000	2.005.197.881	97,93	2.791.064.000	2.725.820.170	97,66
London	1.293.200.000	1.037.233.572	80,21	1.528.687.000	1.493.634.293	97,71	1.330.782.000	1.275.308.336	95,83	2.047.499.000	1.920.272.067	94,22	4.363.874.000	3.381.530.040	95,15
Jeddah	2.564.932.000	2.413.249.929	94,09	1.504.306.000	1.480.282.716	98,40	1.559.824.000	1.557.091.904	98,77	2.047.499.000	1.965.438.506	96,58	3.585.936.000	3.575.311.816	99,70
	Persentase Rata-Rata Realisasi 2020-2024		90,83			98,69			98,66			97,61			97,42

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran Pused Fasilitas Kemiraan dan Kulembagaan Internasional

- Realisasi anggaran Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2020–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan rata-rata tingkat penyerapan anggaran berada di atas 90% setiap tahunnya dan cenderung meningkat hingga mencapai 97,42% pada tahun 2024.
- Hampir seluruh perwakilan mampu merealisasikan anggaran di atas 95%, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.
- Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran perwakilan luar negeri telah mendukung secara optimal pelaksanaan diplomasi transportasi, fasilitas kerja sama internasional, serta operasional perwakilan, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi PFKKI dalam memperkuat peran dan kinerja kerja sama internasional sektor transportasi pada periode perencanaan 2025–2029.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang dihadapi PFKKI adalah sebagai berikut:

1.2.1 POTENSI PFKKI

Dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri dalam kerangka Sub Regional, Bilateral dan Multilateral di Bidang Transportasi Kementerian Perhubungan telah membuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen dan integritas pimpinan dan para staf Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;

PFKKI ditopang oleh komitmen dan integritas pimpinan serta aparatur dalam menjalankan fungsi fasilitasi kemitraan dan kelembagaan internasional. Nilai integritas dan profesionalisme yang terus dikembangkan menjadi modal penting dalam memastikan setiap proses kerja sama dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan nasional. Kondisi ini memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan domestik dan mitra internasional terhadap PFKKI sebagai unit kerja yang konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

2. Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri;

Pengelolaan kerja sama yang telah berjalan memberikan landasan bagi PFKKI untuk mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan berbasis kinerja. Pengalaman dalam memfasilitasi berbagai bentuk perjanjian kerja sama, baik sub-regional, bilateral, maupun multilateral, menjadi modal awal untuk menyempurnakan pemantauan implementasi dan penilaian manfaat kerja sama. Kondisi ini mendukung peningkatan efektivitas kerja sama serta kesesuaiannya dengan arah pembangunan transportasi nasional.

3. Penguatan koordinasi lintas unit kerja dan Kementerian/Lembaga serta organisasi internasional;

Sebagai unit dengan mandat koordinatif, PFKKI berperan sebagai simpul penghubung antara unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dengan Kementerian/Lembaga terkait dan organisasi internasional. Posisi kelembagaan ini memungkinkan penyelarasan kepentingan, kebijakan, dan program kerja sama agar sejalan dengan prioritas nasional. Peran koordinatif tersebut turut mendukung terciptanya sinergi antar pemangku kepentingan dan meminimalkan tumpang tindih pelaksanaan kerja sama.



4. Peningkatan peran serta Indonesia dalam sidang nasional dan internasional;

Pengalaman PFKKI dalam memfasilitasi partisipasi Indonesia pada berbagai forum nasional dan internasional menjadi modal strategis untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi Indonesia di tingkat regional dan global. Dukungan terhadap penyusunan posisi nasional dan pengelolaan keikutsertaan delegasi memungkinkan Indonesia berperan lebih aktif dalam pembahasan kebijakan dan standar transportasi internasional. Hal ini memperkuat posisi tawar dan visibilitas Indonesia dalam kerja sama internasional.

5. Mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang terlibat dalam kerja sama internasional melalui penugasan yang tepat, pelatihan dan pendidikan untuk memperkuat kualifikasi serta keterampilan yang diperlukan;

Keberadaan aparatur dengan latar belakang substansi transportasi dan pengalaman kerja sama internasional menjadi kekuatan penting bagi PFKKI. Kondisi ini membuka ruang pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendidikan, dan penugasan yang tepat. Penguatan kompetensi tersebut mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan mampu merespons dinamika kerja sama internasional yang semakin kompleks.

6. Mengembangkan penggunaan sistem digital dan inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan kerja sama di bidang transportasi;

Pengelolaan data dan dokumentasi kerja sama yang telah berjalan menjadi dasar bagi PFKKI untuk mengembangkan sistem digital yang lebih terintegrasi. Pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang peningkatan efisiensi proses kerja, akurasi data, serta kemudahan pemantauan dan pelaporan. Transformasi digital ini mendukung penguatan tata kelola kerja sama yang modern dan berbasis data.

7. Peningkatan promosi potensi di bidang transportasi kepada dunia internasional;

Keterlibatan PFKKI dalam berbagai forum internasional dan jejaring kerja sama yang telah terbangun memberikan ruang strategis untuk memperkenalkan kebijakan, program, dan peluang kerja sama transportasi Indonesia. Upaya ini mendukung peningkatan minat mitra internasional terhadap kerja sama teknis, investasi, dan pengembangan kapasitas di sektor transportasi. Promosi tersebut berkontribusi pada penguatan diplomasi pembangunan transportasi nasional.

8. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi internasional di bidang transportasi;

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional bidang transportasi memberikan peluang strategis bagi PFKKI untuk mendorong peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam perumusan kebijakan serta standar global. Dukungan terhadap peningkatan keterwakilan Indonesia dalam struktur organisasi internasional memperkuat upaya pengarusutamaan kepentingan nasional di tingkat global.



9.Peningkatan peran dan keterwakilan Indonesia di dunia internasional melalui peningkatan kerjasama luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan transportasi di Indonesia;

Kerja sama luar negeri yang telah terjalin menjadi instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan transportasi nasional. Melalui kerja sama tersebut, terbuka peluang akses terhadap pendanaan, transfer teknologi, dan penerapan praktik terbaik internasional. Pemanfaatan kerja sama secara optimal mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi.

10.Peningkatan peran Perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri di negara akreditasi sesuai dengan tugas fungsi Representasi Diplomatiknya.

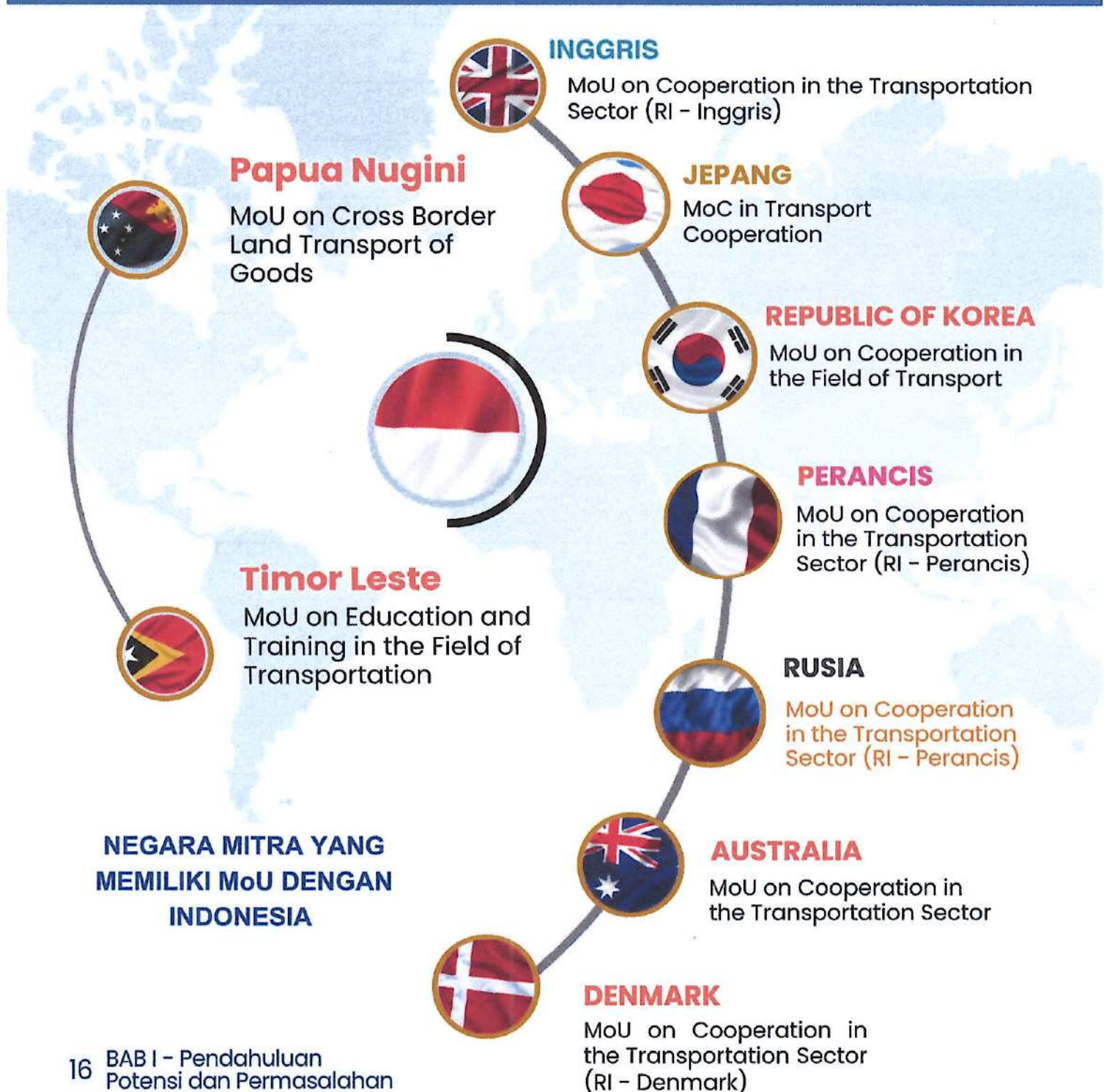
Keberadaan Perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri merupakan aset strategis dalam memperluas jejaring dan memantau peluang kerja sama di negara akreditasi. Sinergi antara PFKKI dan perwakilan di luar negeri mendukung penguatan diplomasi transportasi, pemantauan perkembangan kebijakan internasional, serta tindak lanjut kerja sama. Hal ini memperluas jangkauan dan efektivitas pelaksanaan kerja sama internasional di bidang transportasi.

Strategi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan kerja sama dan kemitraan dalam negeri, kerja sama luar negeri serta ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi adalah sebagai berikut:

- 1.Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, short course, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
- 2.Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan kerja sama di sektor transportasi guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan;
- 3.Penguatan komitmen dan dukungan pimpinan unit kerja dalam pelaksanaan kerja sama dan kemitraan, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- 4.Penyusunan dan pengelolaan basis data proyek kerja sama bidang transportasi yang terstruktur dan terklasifikasi berdasarkan tingkat kesiapan sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan;
- 5.Melakukan peningkatan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara dan organisasi internasional terkait bidang transportasi;
- 6.Melakukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholder terkait dengan fokus untuk pencapaian tujuan bersama pada bidang transportasi.

**PROGRAM KERJA
PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL**

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA



KERJA SAMA INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA

RENCANA PROGRAM PFKKI DAN BPSDMP



SUBREGIONAL



Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines
East ASEAN Growth Area
(BIMP-EAGA)



Kerjasama dalam
kawasan
lingkup ASEAN

Bertujuan untuk
mengurangi
kesenjangan
pembangunan
antara wilayah
Subnasional



Diharapkan dapat
memperkuat
perdagangan lintas
batas serta
mempromosikan
perdagangan, investasi
dan pariwisata



KERJASAMA PADA KAWASAN SUBREGIONAL

1. MoU on Transit and Inter-State Transport of Goods
2. MoU on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches
3. MoU on Establishing and Promoting Efficient and Integrated Sea Linkages

FORUM KERJASAMA SUBREGIONAL

1. Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines east Asia Growth Area (BIMP-EAGA) Transport Cluster Meeting (TCM)
2. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Working Group Transport Connectivity (WGTC) Meeting

ISU STRATEGIS PFKKI

Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional

• PERJANJIAN KERJASAMA INTERNASIONAL



• HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL



Bidang Hubungan Multilateral

• HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL • PERJANJIAN KERJASAMA INTERNASIONAL

Pertemuan the
ASEAN-Japan STOM
Leaders Conference

Pertemuan
the ASEAN-ROK
Transport
Cooperation Forum

Penyiapan Bahan Menteri
Perhubungan terkait
Pencalonan Kembali
Indonesia sebagai Anggota
Dewan IMO Kategori C
periode 2026-2027

Pertemuan
ASEAN Transport
Facilitation Working
Group (TFWG)

ASEAN Senior Transport
Officials Meeting
(ASEAN STOM) and
Associated Meetings

ASEAN Transport
Ministers Meeting
(ATM)

Ratifikasi Protocol to Implement the
12th Package of Commitments on Air
Transport Services under the ASEAN
Framework Agreement on Services
(AFAS Paket ke - 12)

Ratifikasi ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Type
Approval for Automotive Products
(APMRA)

Ratifikasi ASEAN Mutual
Recognition Arrangement on Flight
Crew Licensing (ASEAN MRA FCL)

Ratifikasi Protocol to Amend the
Convention on Offences and
Certain Other Acts Committed on
Board Aircraft [Montreal Protocol
2014]

Ratifikasi Protocol relating to an
Amendment to the Convention on
International Civil Aviation [Article 3
Bis]

Ratifikasi Konvensi Pembentukan
International Organization for
Marine Aids to Navigation (IOMAN)

1.2.2 TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PFKKI

PFKKI menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kerja sama, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seiring dengan semakin kompleksnya dinamika kerja sama sektor transportasi dan tuntutan peningkatan kinerja kelembagaan. Keberhasilan PFKKI sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam fasilitasi kemitraan dan kerja sama internasional sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan tersebut antara lain meliputi dinamika kebijakan pembangunan nasional, perkembangan hubungan internasional, tuntutan akuntabilitas publik, serta percepatan transformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi tersebut, PFKKI perlu secara sistematis memperhatikan dan mengelola berbagai faktor internal dan eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena itu, pemetaan permasalahan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan strategis, guna memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan mampu menjawab tantangan yang dihadapi serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan, tantangan utama yang dihadapi PFKKI Sekretariat Jenderal antara lain sebagai berikut:

1. Kebutuhan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi, khususnya dalam mendukung pelaksanaan kerja sama dan kemitraan di dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sistem dan tata laksana yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis proses bisnis yang jelas diperlukan agar fasilitasi kerja sama dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta mampu merespons dinamika kerja sama internasional yang semakin kompleks.
2. Pentingnya pemenuhan dan penguatan sumber daya manusia sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan kompetensi, terutama dalam menangani isu-isu kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang bersifat lintas sektor dan lintas negara. Tantangan ini mencakup kebutuhan peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan komunikasi internasional, serta penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan administrasi ketatausahaan di lingkungan PFKKI agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal.
3. Perlunya pemenuhan dan peningkatan fasilitas pendukung serta peralatan perkantoran, sebagai prasyarat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PFKKI. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk dukungan teknologi informasi dan sistem kerja digital, menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas kerja, kualitas layanan, serta efektivitas koordinasi dan fasilitasi kerja sama.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN





2.1 VISI PFKKI



VISI

Terwujudnya Fasilitas Kemitraan dan Optimalisasi Hubungan Kerja Sama Bidang Transportasi serta Pelayanan Transportasi Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri.

2.2 MISI PFKKI

MISI

- Pengelolaan administrasi Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri;
- Menjadikan Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri focal point dalam kerja sama di tingkat Nasional dan Internasional;
- Berperan aktif dalam penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
- Pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan yang akan dikerjasamakan

2.3 TUJUAN PFKKI

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Perhubungan serta Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pelayanan Transportasi Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri.

Tujuan dimaksud dapat dicapai dengan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui tersedianya dokumen kerja sama Dalam Negeri dan Luar Negeri, *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Penyelenggaraan Pertemuan Internasional serta tercapainya pelayanan transportasi Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri.

2.4 SASARAN PFKKI

SASARAN

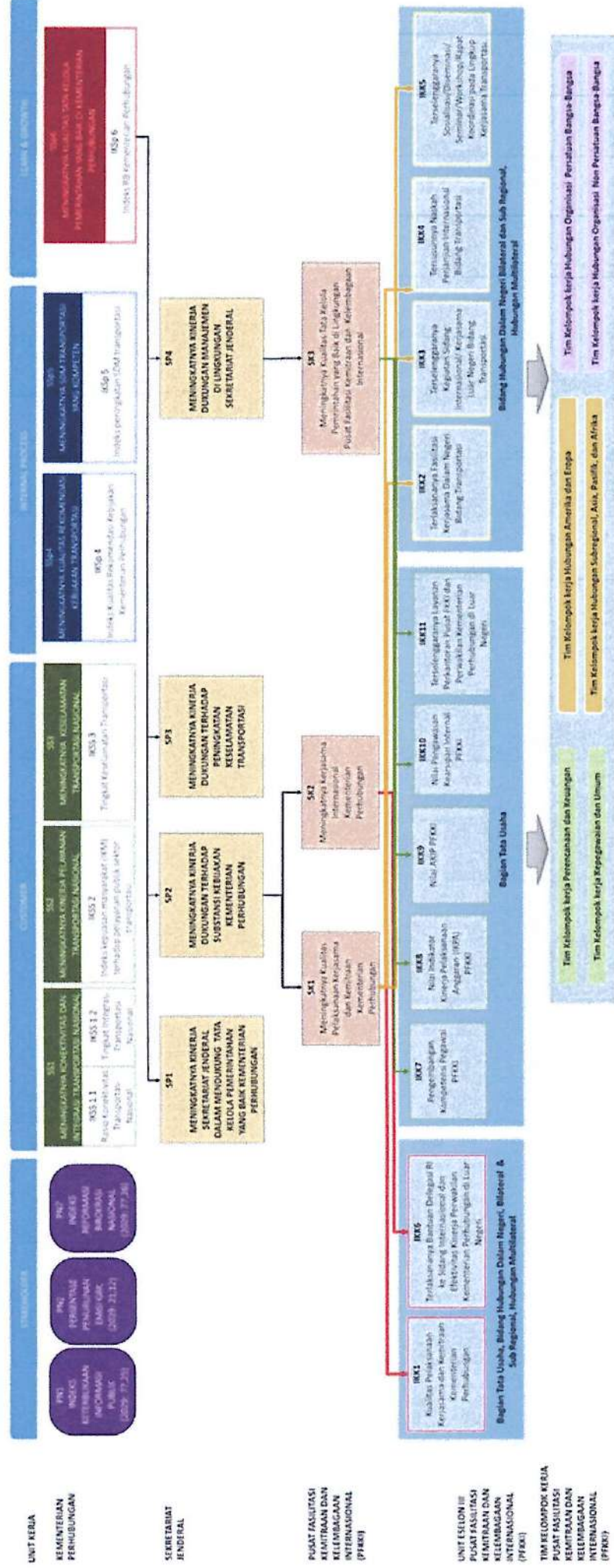
Sasaran Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan oleh Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih baik;
2. Peningkatan pelayanan perhubungan melalui penyelenggaraan pertemuan Internasional;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi serta konsultasi dengan lembaga terkait Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri;
4. Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi;
5. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya manusia (SDM) secara berkelanjutan.

2.5 STRATEGIC MAP PFKKI 2025-2029

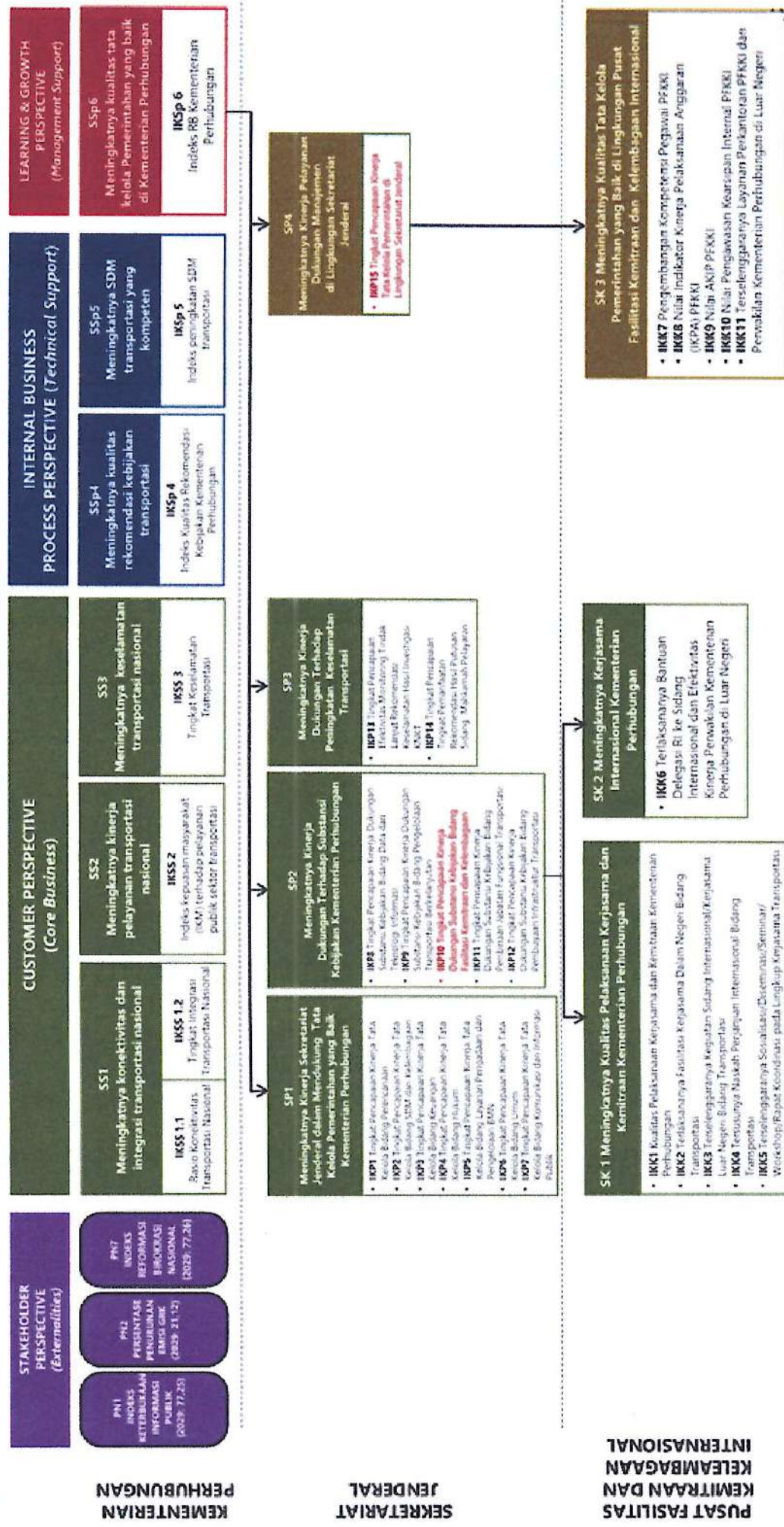
Strategic map

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal
PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL
TAHUN 2025-2029



**Perja Kegiatan (IKK)
N INTERNASIONAL**

**Cascading Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
PUSAT FASILITAS KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL**





BAB III

ARAH KEBIJAKAN

DAN STRATEGI



3.1 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RPJPN 2025-2045 merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang disusun untuk periode lima tahun. RPJPN 2025 2045 memiliki tujuan utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang Bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Terdapat lima sasaran utama Visi Indonesia 2045 sebagai berikut:

Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Buku Narasi RPJMN Tahun 2025-2029



Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan, yaitu:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

Pada tahap pertama RPJPN, yaitu pada tahun 2025-2029, pembangunan dititikberatkan pada penguatan transformasi. Beberapa titik berat program antara lain pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, peningkatan kualitas SDM, upaya lanjutan proses hilirisasi SDA unggulan, penerapan ekonomi hijau, hingga perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, transformasi kelembagaan hukum.

Melalui misi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, telah ditetapkan arah pembangunan, salah satunya Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan. Diplomasi Tangguh merupakan diplomasi total yang sinergis meliputi diplomasi ekonomi, budaya, kedaulatan, kepemimpinan, perlindungan dan publik. Diplomasi tangguh bersifat strategis, proaktif, sinergis, dan berkelanjutan antar bidang diplomasi yang dilakukan para pemangku kepentingan meliputi perumus kebijakan dan pelaku hubungan luar negeri lainnya, baik pemerintah maupun non pemerintah, dan didukung dengan modalitas yang andal.

Kebijakan luar negeri Indonesia akan dioptimalkan untuk memantapkan kepemimpinan yang lebih proaktif guna menjaga stabilitas kawasan dan global serta berperan penting dalam pembentukan tatanan internasional.

3.2 VISI MISI PRESIDEN

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi tersebut dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sarasannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Arah kebijakan Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Kemenhub 2025-2029, bahwa tingkat keberhasilan Kemenhub diukur dengan sasaran strategis dan sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi perhubungan.

Arah Kebijakan pada Sasaran Strategis 6 (SSp6) Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan, yaitu:

- Arah Kebijakan 20 (AK20) Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi, antara lain dilakukan melalui:
 1. Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sektor transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.
 2. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional.
 3. Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antar daerah.
- Arah Kebijakan 21 (AK21) Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain dilakukan melalui:
 1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 2. Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju Good Governance yang didorong oleh pemanfaatan teknologi.
 3. Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 4. Pelaksanaan transformasi digital untuk mendorong penerapan SPBE dan smart government di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 5. Peningkatan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko (PPBR) dibidang transportasi.
 6. Peningkatan pencatatan dan optimalisasi pemanfaatan asset Kementerian Perhubungan.
 7. Peningkatan integritas, profesionalisme dan budaya kerja serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN Kementerian Perhubungan.
 8. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk pembentukan SDU (Special Delivery Unit) untuk memastikan tercapainya target kinerja dan kemanfaatan hasil pembangunan bidang perhubungan.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PFKKI

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 telah ditetapkan misi pembangunan Indonesia Emas, salah satunya adalah Misi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Misi tersebut menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan peran dan pengaruh Indonesia di tingkat global, serta penguatan kerja sama internasional sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, sektor transportasi memiliki peran kunci dalam mendukung konektivitas, daya saing, dan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global.

Dalam konteks tersebut, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan berperan strategis sebagai koordinator fasilitasi kerja sama internasional di bidang transportasi. PFKKI menjadi simpul koordinasi yang memastikan bahwa kerja sama internasional sektor transportasi dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan kepentingan nasional. Melalui penguatan kemitraan bilateral, regional, dan multilateral, PFKKI mendorong terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi standar dan regulasi transportasi internasional, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kerja sama internasional sektor transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana diplomasi, tetapi juga sebagai katalis pembangunan transportasi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, kebijakan Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PFKKI diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan tata kelola ini menjadi prasyarat utama untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan sektor perhubungan, khususnya dalam menghadapi dinamika global, kompleksitas kerja sama internasional, serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.



Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus mencapai tujuan dan sasaran Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) pada periode Tahun 2025–2029, Kementerian Perhubungan menempuh kebijakan yang mendorong terselenggaranya kerja sama internasional serta pertemuan internasional bidang perhubungan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kerja sama internasional sektor transportasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pembangunan transportasi nasional, penguatan kelembagaan, serta peningkatan posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama global.

Pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan sinergi lintas sektor. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kerja sama internasional. Dengan demikian, setiap bentuk kerja sama dan pertemuan internasional yang difasilitasi oleh PFKKI diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional, mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor transportasi, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan komitmen internasional Indonesia.

Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan ketatausahaan dan pengelolaan rumah tangga, melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, administrasi, serta pelaporan kinerja guna mendukung tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
2. Peningkatan koordinasi dengan sektor lain dalam kerja sama sektor transportasi, baik dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keselarasan kebijakan, efektivitas pelaksanaan kerja sama, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.
3. Penguatan koordinasi dan fasilitasi kerja sama luar negeri sektor transportasi dalam kerangka regional, bilateral, dan multilateral, guna meningkatkan peran aktif Indonesia dalam forum transportasi internasional, memperluas kemitraan strategis, serta mendukung diplomasi transportasi yang berorientasi pada kepentingan nasional dan peningkatan daya saing sektor perhubungan.

3.5 KERANGKA REGULASI

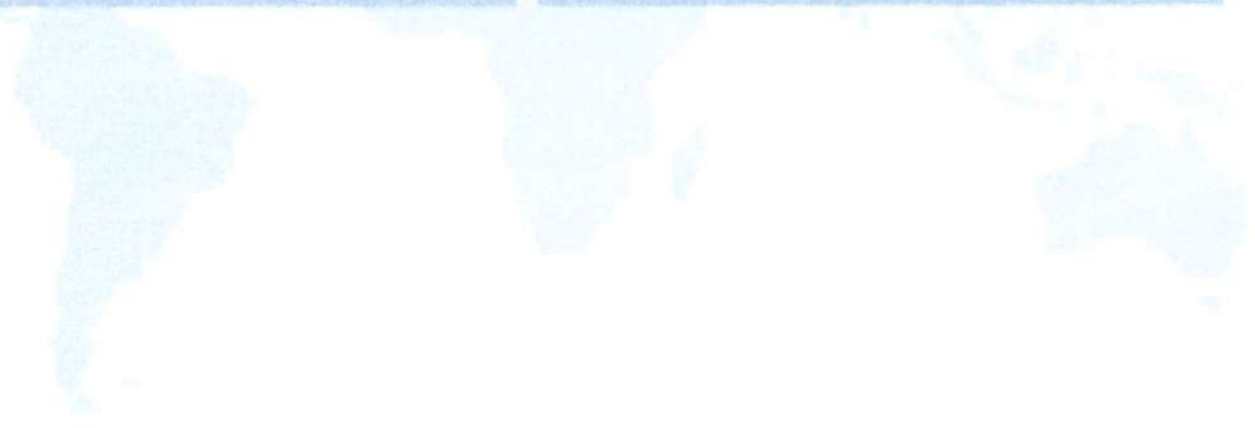
Kerangka regulasi Fasilitas Kemitraan dan Kerja Sama Internasional (PFKKI) disusun sebagai upaya memperkuat dasar hukum, memperjelas arah pelaksanaan kebijakan, serta memastikan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan dalam rangka optimalisasi kerja sama internasional bidang transportasi dan peningkatan pelayanan transportasi oleh Perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, sejalan dengan arah kebijakan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja lainnya. Strategi yang dapat dilaksanakan meliputi revisi/penyempurnaan peraturan/permenhub yang mengatur kewenangan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PFKKI. Mengoptimalkan reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan kementerian perhubungan turut menjadi langkah yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan. Berikut tabel kerangka regulasi dan urgensi regulasi pelaksanaan tugas dan fungsi PFKKI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Kerangka/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian / Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L)
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Setiap instansi pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga, Eselon 1 dan Eselon II wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.



Kerangka/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Regulasi
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029	Sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
PM 4 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	Pedoman Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menjalankan tugas pokok fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan, dan Tenaga Staf Pada Perwakilan RI di Luar Negeri	Pedoman Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan, dan Tenaga Staf Pada Perwakilan RI di Luar Negeri menjalankan tugas pokok fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan



3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PFKKI, diperlukan evaluasi terhadap aspek kelembagaan yang meliputi struktur organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pemanfaatan sumber daya organisasi. Evaluasi kelembagaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa PFKKI mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendukung penguatan kerja sama dan kemitraan dalam negeri maupun luar negeri di bidang transportasi secara optimal.

Evaluasi	Uraian
Evaluasi Birokrasi	Evaluasi dilakukan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Evaluasi ini bertujuan menilai kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, kejelasan pembagian peran, serta kelancaran alur koordinasi dan pengambilan keputusan. Hasil evaluasi diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses administrasi kerja sama, serta memperkuat koordinasi internal dan eksternal.
Pemenuhan Tujuan Strategis	Evaluasi dilakukan untuk memastikan keselarasan antara visi, misi, dan strategi PFKKI dengan tujuan strategis Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan. Penyelarasan ini ditujukan agar seluruh kegiatan fasilitasi dan pengelolaan kerja sama sub-regional, bilateral, dan multilateral dapat secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan transportasi nasional serta prioritas kebijakan pemerintah dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Optimalisasi Sumber Daya	Evaluasi pemanfaatan sumber daya dilakukan terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dukungan anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas PFKKI, termasuk dalam pengelolaan administrasi kerja sama, koordinasi lintas unit kerja, serta interaksi dengan mitra internasional.
Peningkatan Adaptasi dan Resiliensi	Evaluasi kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global. Penguatan adaptasi dan resiliensi organisasi diperlukan agar PFKKI mampu merespons perubahan kebijakan internasional, perkembangan geopolitik, serta tantangan global di sektor transportasi secara tepat waktu dan terkoordinasi.
Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi	Evaluasi dilakukan untuk memperkuat fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dan kemitraan. Penguatan fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian, kesepakatan, dan program kerja sama yang difasilitasi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan transportasi nasional.

3.7 MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien diperlukan adanya penerapan manajemen risiko yang pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan mempertimbangkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait penetapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dalam RKP.

Berikut merupakan pelaporan dan identifikasi awal selama 2 (dua) tahun penerapan sistem manajemen risiko dan rencana tindak lanjut pengendalian yang menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas fungsi Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional:

Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko
Kerjasama dalam negeri tidak berjalan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan	1. Meningkatkan koordinasi antar pihak terkait dengan menjalin komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap proyek kerjasama yang ada untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati/ditetapkan
Tidak ada pengiriman Delegasi RI ke Sidang Internasional	1. Selektif dalam pemilihan kegiatan luar negeri yang akan dihadiri oleh delegasi 2. Melakukan perencanaan anggaran secara detail"
Keterlambatan pada penyelesaian Ratifikasi Perjanjian Internasional	1. Memastikan koordinasi yang efektif antarpihak terkait 2. Menyusun rencana kerja yang jelas dan terperinci
Keterlambatan dalam pengelolaan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban urusan keuangan	Pentingnya melakukan efisiensi proses administrasi keuangan yang melibatkan SDM yang terlatih, memperbaiki sistem teknologi, serta memperjelas prosedur yang harus diikuti.



BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA

PENDANAAN



4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan Peta Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan 2025-2029, dan Sasaran Program Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, bahwa PFKKI berada pada Sasaran Program 1 yaitu Meningkatnya Kinerja Sekretariat Jenderal dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Perhubungan dan Sasaran Program 4 yaitu Meningkatnya Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan Utama (IKK/IKU) PFKKI, sebagai berikut:

1. Kualitas Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti

Target Kualitas Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti adalah berupa draft dokumen perjanjian kerjasama dalam negeri yang siap ditandatangani, sehingga apabila PFKKI dapat memfasilitasi sampai dengan menghasilkan draft perjanjian kerjasama bidang transportasi yang siap ditandatangani minimal 3 (tiga) draft Dokumen dalam dalam 1 (satu) tahun berjalan.

2. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi

Target Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/ Harmonisasi adalah dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan menghasilkan Dokumen kerjasama yang ditandatangani meliputi *Memorandum of Understanding* (MOU) Tingkat Menteri, Perpanjangan/Revisi MOU dan Adopsi Perjanjian Internasional. Termasuk Dokumen Ratifikasi yang di harmonisasi merupakan dokumen produk hukum yang diajukan untuk dilakukan pembahasan di Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab di bidang produk hukum. Selanjutnya apabila PFKKI dapat memfasilitasi sampai dengan menghasilkan draft dokumen perjanjian kerjasama bidang transportasi yang siap ditandatangani minimal 6 (enam) draft dokumen dalam 1 (satu) tahun berjalan.

**TARGET RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL TAHUN 2025 -2029**

URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2025-2029
MENINGKATKANNYA KAPABILITAS KERJASAMA DAN KEMITRAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (SASARAN PROGRAM)							
A. MENINGKATKANNYA KUALITAS PELAKSANAAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN							
KUALITAS PELAKSANAAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	NILAI	88	90	93	94	95	95
TERLAKSANANYA FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI BIDANG TRANSPORTASI	PERSENTASE	100	100	100	100	100	100
TERSELENGGARANYA KEGIATAN SIDANG INTERNASIONAL/ KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG TRANSPORTASI	PERSENTASE	100	100	100	100	100	100
TERSUSUNNYA NASKAH PERJANJIAN INTERNASIONAL BIDANG TRANSPORTASI I TERLAKSANANYA FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI BIDANG TRANSPORTASI	PERSENTASE	100	100	100	100	100	100
TERSELENGGARANYA SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/RAPAT KOORDINASI PADA LINGKUP KERJASAMA TRANSPORTASI	PERSENTASE	100	100	100	100	100	100
TERSELENGGARANYA LAYANAN KETATAUSAHAAN	PERSENTASE	100	-	-	-	-	100
B. MENINGKATKANNYA KERJASAMA INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN							
TERLAKSANANYA BANTUAN DELEGASI RI KE SIDANG INTERNASIONAL DAN EFEKTIVITAS KINERJA PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LUAR NEGERI	PERSENTASE	100	100	100	100	100	100
C. MENINGKATKANNYA KINERJA PELAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL							
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PFKKI	PERSENTASE	-	100	100	100	100	100
NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (JKPA) PFKKI	NILAI	-	100	100	100	100	100
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PFKKI	NILAI	-	85	86	87	88	88
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PFKKI	NILAI	-	86	87	88	89	89
TERSELENGGARANYA LAYANAN PERKANTORAN PUSAT FKKI DAN PERWAKILAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI LUAR NEGERI	PERSENTASE	100	100	100	100	100	100

Sumber: Analisa Data Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

4.2 KERANGKA KINERJA DAN MANUAL IKU

INDIKATOR KINERJA		BASELINE				
		2025	2026	2027	2028	2029
SP2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
IKP2	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan					
IKK 2.18	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	88	90	93	94	95
DEFINISI						
Kegiatan pengembangan kemitraan dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang transportasi dalam kerangka bilateral, regional/subregional, dan multilateral yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan merupakan kegiatan pokok yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi utama dari keberadaan PFKKI dalam struktur organisasi kelembagaan kementerian Perhubungan. Untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari kegiatan tersebut, yang tentunya juga merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja PFKKI secara keseluruhan, maka disusun 1 (satu) sasaran kegiatan beserta target yang menjadi penilaian kinerjanya. Kegiatan peningkatan/pengembangan kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri serta Ratifikasi di Bidang Transportasi Dalam Kerangka Bilateral, Regional/Subregional, dan Multilateral yang dilaksanakan oleh PFKKI Kementerian Perhubungan merupakan kegiatan pokok yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi utama dari keberadaan PFKKI dalam struktur organisasi kelembagaan Kementerian Perhubungan. Untuk dapat mengetahui capaian kinerja dari kegiatan tersebut, yang tentunya juga merupakan gambaran keberhasilan dari kinerja PFKKI secara keseluruhan, maka disusun 1 (satu) sasaran kegiatan beserta target yang menjadi penilaian kinerjanya. Sasaran Kegiatan adalah Meningkatkan Kapabilitas Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Perhubungan, dengan capaian kinerja ditunjukkan: - Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti; dan - Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi.						
SUMBER DATA						
Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional						

CARA MENGHITUNG

1. Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti
Target Kualitas Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Kementerian Perhubungan yang ditindaklanjuti adalah berupa draft dokumen perjanjian kerjasama dalam negeri yang siap ditandatangani, sehingga apabila PFKKI dapat memfasilitasi sampai dengan menghasilkan draft perjanjian kerjasama bidang transportasi yang siap ditandatangani dalam dalam 3 (tiga) draft dokumen dalam 1 (satu) tahun berjalan, maka kualitas capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut akan terpenuhi dengan rumus metode perhitungan:

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{\text{(Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri yang ditindaklanjuti)}}{\text{(Target Kerjasama Dalam Negeri)}}$$

2. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi

Target Kualitas Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi Kementerian Perhubungan yang ditandatangani/Harmonisasi adalah dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan menghasilkan Dokumen kerjasama yang ditandatangani meliputi:

1. MOU Tingkat Menteri
2. Perpanjangan/revisi MOU
3. Adopsi Perjanjian Internasional

Termasuk Dokumen Ratifikasi yang di Harmonisasi merupakan dokumen produk hukum yang diajukan untuk dilakukan pembahasan di Kementerian yang bertanggungjawab di bidang produk hukum. Selanjutnya apabila PFKKI dapat memfasilitasi sampai dengan menghasilkan draft dokumen perjanjian kerjasama bidang transportasi yang siap ditandatangani minimal 6 (enam) draft dokumen dalam 1 (satu) tahun berjalan, maka kualitas capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut akan terpenuhi dengan rumus metode perhitungan:

$$\text{Nilai Kualitas} = \frac{\text{(Dokumen Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi yang di Tandatangan/Harmonisasi)}}{\text{(Target Dokumen Kerjasama Luar Negeri dan Ratifikasi yang di Tandatangan/Harmonisasi)}}$$

Maka formulasi Target IKU Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai IKU/IKK PFKKI} = \frac{\text{[Fasilitas KSDN+Pelaksanaan KSLN\&Ratifikasi]}}{2} \times \text{BASELINE}$$

SATUAN

Nilai

PENANGGUNG JAWAB DATA

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

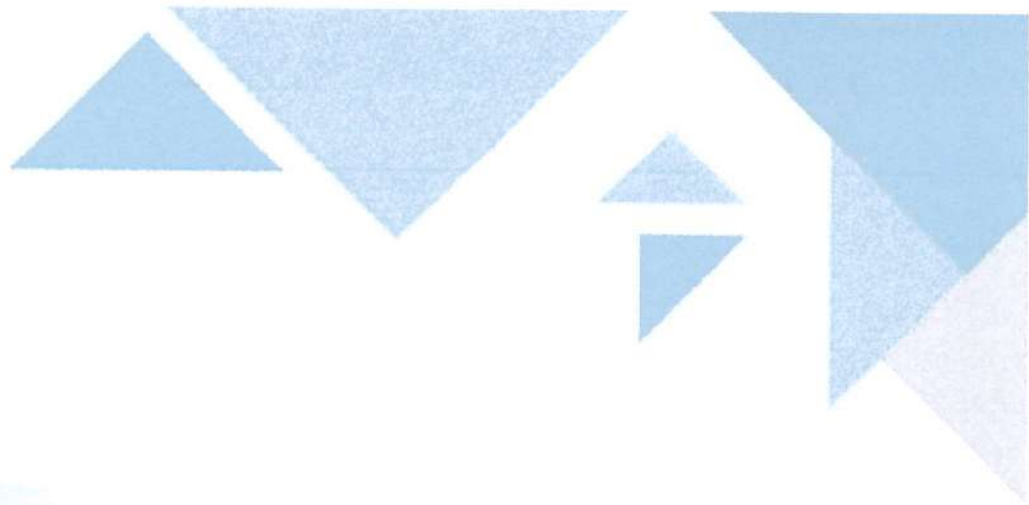
4.3 KERANGKA PENDANAAN

Dalam Rupiah (Ribuan)

NO	SATUAN KERJA	SKEMA	TAHUN				
			2025*	2026	2027	2028	2029
1	Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	Optimis	36.577.445	47.550.678	61.815.882	74.179.058	89.014.869
		Moderate	14.764.647	22.146.970	25.700.000	28.518.000	33.220.445
		Pesimis/Efisiensi	1.147.406	16.610.227	19.275.000	21.388.500	24.915.333
2	Atase Perhubungan Jeddah	Optimis	3.327.834	4.326.184	6.824.039	7.311.251	11.194.626
		Moderate	2.686.558	3.223.869	3.868.643	4.642.372	5.570.846
		Pesimis/Efisiensi	2.417.902	2.901.482	3.481.778	4.178.134	5.013.761
3	Atase Perhubungan London	Optimis	3.322.794	4.319.632	5.615.521	7.300.178	9.490.231
		Moderate	3.543.948	4.252.737	5.103.285	6.123.942	7.348.730
		Pesimis/Efisiensi	3.189.553	3.827.463	4.592.956	5.511.547	6.613.857
4	Atase Perhubungan Den Haag	Optimis	4.215.349	5.178.738	6.732.360	8.752.068	11.377.688
		Moderate	3.966.525	5.949.787	7.000.000	8.000.000	8.924.680
		Pesimis/Efisiensi	3.569.872	4.283.847	5.140.616	6.168.739	7.402.487
5	Atase Perhubungan Washington DC	Optimis	3.520.202	4.576.262	5.949.141	7.733.883	10.054.048
		Moderate	3.104.800	3.725.760	4.470.912	5.365.094	6.438.113
		Pesimis/Efisiensi	2.794.320	3.353.184	4.023.820	4.828.584	5.794.301
6	Atase Perhubungan Tokyo	Optimis	5.404.812	6.717.852	8.733.208	11.353.171	14.759.122
		Moderate	5.222.419	6.266.902	7.520.283	9.024.340	10.829.208
		Pesimis/Efisiensi	4.700.177	5.640.212	6.768.254	8.121.905	9.746.287
7	Atase Perhubungan Montreal	Optimis	3.201.522	3.901.978	5.072.572	6.594.343	8.572.646
		Moderate	3.086.064	3.703.276	4.443.932	5.332.718	6.399.262
		Pesimis/Efisiensi	2.777.457	3.332.949	3.999.538	4.799.446	5.759.336
8	Atase Perhubungan Singapura	Optimis	4.284.496	4.789.844	6.226.798	8.094.837	10.523.289
		Moderate	3.963.848	4.756.617	5.707.941	6.849.529	8.219.435
		Pesimis/Efisiensi	3.567.463	4.280.955	5.137.147	6.164.576	7.397.491
9	Atase Perhubungan Kuala Lumpur	Optimis	3.644.296	4.737.584	6.158.860	8.006.518	10.408.473
		Moderate	3.497.416	4.196.899	5.036.279	6.043.534	7.252.241
		Pesimis/Efisiensi	3.147.674	3.777.209	4.532.651	5.439.181	6.527.017

Sumber: Penyampaian Formulasi Indikator Kinerja dan Manual IKU serta Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Strategis PFKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri Tahun 2025-2029

- Matriks Kerangka Pendanaan Renstra PFKKI dan Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri Tahun 2025-2029 menunjukkan implikasi kebijakan yang menempatkan penguatan kerja sama internasional sektor transportasi sebagai prioritas strategis yang memerlukan dukungan anggaran yang terencana, bertahap, dan berkelanjutan.
- Peningkatan alokasi pada skenario optimis dan moderat mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat peran PFKKI sebagai koordinator diplomasi dan kemitraan transportasi, meningkatkan efektivitas perwakilan luar negeri, serta memperluas partisipasi Indonesia dalam forum bilateral, regional, dan multilateral. Sementara itu, skenario pesimis/efisiensi menegaskan pentingnya prioritas anggaran pada kegiatan inti yang berdampak langsung pada kepentingan nasional, peningkatan kualitas layanan kerja sama, dan penguatan tata kelola, sehingga kebijakan penganggaran tetap adaptif terhadap kapasitas fiskal negara tanpa mengurangi capaian strategis.
- Dengan demikian, matriks pendanaan ini menjadi instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran PFKKI dan perwakilan luar negeri selaras dengan arah kebijakan nasional, prioritas Kementerian Perhubungan, serta target pembangunan jangka menengah 2025–2029.



BAB V

PENUTUP



5.1 ARAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keterlaksanaan Rencana Strategis Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Tahun 2025–2029, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran tahunan (Rencana Kerja/Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/RKA-KL) dengan sasaran strategis dan arah kebijakan Rencana Strategis Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, guna menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja kerja sama dalam dan luar negeri.
2. Penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mendukung keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama sub-regional, bilateral, dan multilateral di bidang transportasi.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama melalui sistem monitoring berbasis indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan ketercapaian sasaran Renstra.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam rangka penguatan fungsi fasilitas, koordinasi, perumusan, dan pengelolaan kerja sama serta kemitraan internasional di bidang transportasi.
5. Penguatan pelibatan pemangku kepentingan yang meliputi unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian/Lembaga, mitra internasional, akademisi, dan sektor swasta dalam pelaksanaan kerja sama guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan transportasi nasional.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini didukung oleh penguatan tata kelola organisasi, inovasi kebijakan, serta transformasi digital dalam pengelolaan kerja sama yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*.